

**PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh

Alfonsus Gea

191010009

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh

Alfonsus Gea

191010009

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfonsus Gea
NPM : 191010009
Fakultas:Ilmu : Sosial dan Humaniora
Program Studi : Administrai Negara

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA BATAM

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Juli 2023



Alfonsus Gea

191010009

**PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memenuhi Gelar Sarjana**

**Oleh
Alfonsus Gea
191010009**

**Telah Disetujui Oleh Pembimbing Pada Tanggal
Seperti Tertera Dibawah Ini**

Batam, 28 Juli 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Etika Khairina', with a date '28/7/23' written below it.

Etika Khairina, S.Sos., M.L.P

Pembimbing



ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di kota Batam, mulai dari sektor koperasi mengalami perkembangan dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan UMKM di kota Batam. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan pendekatan deskriptif, data penelitian dikumpulkan melalui data primer melalui wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro yang secara langsung terlibat dalam implementasi program Pemberdayaan UMKM dan data sekunder dari dokumen dan literatur terkait dokumen laporan kegiatan layanan dinas koperasi. Menurut temuan penelitian, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro telah secara aktif berkontribusi pada pemberdayaan UMKM. Peran tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk pembiayaan, penyediaan fasilitas dan persediaan, pelatihan, promosi, dan pengawasan. Layanan ini bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada UMKM dalam bentuk program yang meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka. Selain itu, UMKM dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk memfasilitasi kegiatan operasionalnya. Berbagai program pelatihan membekali UMKM dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan bisnis lebih efektif. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memberdayakan UMKM di Kota Batam telah direalisasikan melalui program permodalan, pemberian sarana dan prasarana, pelatihan dan pemberdayaan, pemasaran produk, serta melakukan pengawasan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas UMKM yang berdaya saing.

Keywords: Peran Pemerintah, Pemberdayaan UMKM

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the pillars of economic growth in the city of Batam, starting from the cooperative sector experiencing developments from 2021 to 2022. This study aims to look at the role of the Cooperative and Micro Business Office in empowering MSMEs in the city of Batam. This research uses a qualitative methodology, with a descriptive approach, research data collected through primary data through in-depth interviews with officials of the Office of Cooperatives and Micro Enterprises who are directly involved in the implementation of the MSME Empowerment program and secondary data from documents and literature related to cooperative service activity report documents. According to the research findings, the Office of Cooperatives and Micro Enterprises has actively contributed to the empowerment of MSMEs. The role covers various aspects, including financing, provision of facilities and supplies, training, promotion, and supervision. These services aim to provide financial assistance to MSMEs in the form of programs that enhance their capacity and competitiveness. In addition, MSMEs are provided with the necessary infrastructure and facilities to facilitate their operations. Various training programs equip MSMEs with relevant knowledge and skills, enabling them to face business challenges more effectively. Based on the above description, it is concluded that the role of the Cooperatives and Microenterprises Agency in empowering MSMEs in Batam City has been realized through capital programs, providing facilities and infrastructure, training and empowerment, marketing products, and conducting supervision, which aims to improve the quality of competitive MSMEs.

Keywords: *Role of the Government, Strengthening the UMKM*

KATA PENGANTAR

Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi srata satu (S1) pada program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan senantiasa penulis terima dengan senang hati dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyamapaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husada, S.Kom.,M.S.I Selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Lubna Salsabila, S.IP., M.I.P., MPA Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
3. Bapak/Ibu penguji yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.
4. Ibu Etika Khairina, S.Sos., M.I.P Pembimbing Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, yang telah memberikan banyak bantuan dan saran kepada penulis di Universitas Putera Batam.
5. Bapak/Ibu Dosen di Universitas Putera Batam yang telah membuka wawasan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman, dan motivasinya.
6. Kedua Orangtua Penulis Bapak Wita dan mama Wita, dan kakak Yuwita, serta kelima adek dari penulis Paska, Putri, Kristina, dan Lia, bersama dengan keluarga besar yang sangat dicintai, Mereka selalu mendorong, mendukung, dan mendoakan penulis untuk terus bekerja keras untuk menyelesaikan pendidikan.

7. Teman-teman prodi administrasi negara Angkatan 2019 khususnya Rendi Hairudin, Fizar Sepriandy, dan Betty Krisdayanti Sihombing memberi banyak saran dan masukan dari awal kuliah hingga akhir kuliah.
8. Selain itu, rekan-rekan kerja saya dan teman-teman saya, baik di kampus maupun di luar kampus, yang selalu mendukung saya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, Penulis menerima segala kritik, saran, dan masukan yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga penelitian ini menjadi amal ibadah dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Batam, 28 Juli 2023



Alfonsus Gea



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iiiv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Teoritis	10
2.1.1. Konsep Peran Pemerintahan	10
2.1.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah	16
2.2. Pemberdayaan UKM	18
2.2.1. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	25
2.2.2. Karakteristik UMKM	26
2.2.3. Kriteria UMKM	27
2.3. Penelitian Terdahulu.....	29
2.4. Kerangka Berpiki	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Sifat Penelitian	34
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.4. Sumber Data.....	36

3.5. Metode Pengumpulan Data.....	36
3.6. Metode Analisis Data	37
3.7. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. Hasil Penelitian	41
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	41
4.1.2. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Batam	45
4.2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah	50
4.2. Pembahasan	54
4.2.1. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Batam	54
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1. Simpulan	67
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Diagram Perkembangan Ekonomi Kota Batam... ..	51
Grafik 4.2 Tingkat Pengangguran Di Kota Batam	52
Gambar 4.3 Realisasi Pinjaman Modal Usaha Kepada Pelaku UMKM	58
Gambar 4.4 Penyerahan Bantuan Sarana Gerobak kepada UMKM	60
Gambar 4.5 Pelaksanaan Pelatihan Fulfillment	64
Gambar 4.6 Pameran Produk UMKM.....	64
Gambar 4.7 Pelepasan Produk Unggulan UMKM.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Jumlah UMKM yang aktif Pada Tahun 2021-2022.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1 Tabel Periode Penelitian.....	35
Tabel 3.2 Tabel Defenisi Operasional.....	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor ekonomi sangat diandalkan dalam proses pembangunan nasional dan menjadi tolak ukur keberhasilan atas kinerja pemerintah (Marheni, 2022). Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Pembangunan ini harus melibatkan masyarakat sehingga pertumbuhan yang diantisipasi tidak terpusat melainkan merata dan mantap. Pentingnya suatu negara untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator pembangunan nasional (Ikhsanul Kahsanul Kahfi, 2021).

UMKM adalah kegiatan usaha berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan ekonomi, serta memperluas kegiatan usaha dan pemerataan kesempatan kerja secara merata (Marsudi & Filiawati, 2022). Selain itu, UMKM menyerap tenaga kerja lebih cepat dibandingkan sektor lainnya. Selain itu, mereka berkontribusi secara signifikan terhadap ekspor dan perdagangan. Barang-barang yang diproduksi oleh UKM berkualitas tinggi. Ini karena keinginan mereka untuk bersaing di pasar. Meski beroperasi sebagai UMKM, mereka tetap mempertimbangkan kualitas dan kuantitas sebelum membuat produk. Kondisi persaingan pasar tidak dapat dihindari, sehingga mereka

harus bersaing satu sama lain bahkan dengan perusahaan besar untuk mendapatkan keuntungan pasar.

Kota Batam memiliki 81.486 UMKM dengan berbagai bidang usaha, seperti kuliner, kerajinan, fashion, dan lain-lain yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Namun dari sekian banyak usaha mikro yang ada, masih banyak yang belum terdaftar dan belum memiliki izin usaha. Sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional, UMKM di Kota Batam sudah selayaknya mendapat kesempatan untuk mendapat dukungan, perlindungan, dan pengembangan sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok usaha ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, UMKM merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Informasi di bawah ini berkaitan dengan jumlah UMKM di kota Batam.

Tabel 1.1 Tabel Jumlah UMKM yang aktif Pada Tahun 2021-2022

No	Lokasi Koperasi Di Kota Batam	Jumlah Koperasi Aktif 2021	Jumlah Koperasi Aktif 2022
1	Kec. Batu Ampar	102	105
2	Kec. Belakang Padang	28	30
3	Kec. Bulang	31	35
4	Kec. Galang	29	30
5	Kec. Lubuk Baja	117	120
6	Kec. Nongsa	57	59
7	Kec. Sei Beduk	77	80
8	Kec. Sekupang	125	128
9	Kec. Bengkong	58	60
10	Kec. Batam Kota	116	118
11	Kec. Batu Aji	67	70
12	Kec. Sagulung	78	80
	Total	885	910

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2022

Berdasarkan data pada table tersebut dapat disimpulkan bahwa Pada tahun 2021 terdapat 885 koperasi yang beroperasi di Kota Batam, serta pada tahun 2022 terdapat 910 koperasi yang beroperasi. Perkembangan koperasi di Kota Batam mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun seiring dengan berjalannya waktu, UMKM di Kota Batam seringkali menghadapi sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan untuk menjamin keberlangsungan dan pertumbuhannya. Di Kota Batam, akses modal yang terbatas merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM. Adanya industri besar di Kota Batam dapat menciptakan persaingan yang ketat bagi UMKM. Usaha kecil dan menengah UMKM terus menghadapi tantangan dalam memperoleh pinjaman atau modal usaha yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan besar memiliki skala ekonomi, sumber daya yang lebih besar, dan jaringan yang lebih besar, sehingga sulit bagi usaha kecil dan menengah untuk bersaing. Untuk meningkatkan peluangnya, UMKM harus mengejar strategi pemasaran yang inovatif, diferensiasi produk, dan kolaborasi dengan perusahaan besar.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, lembaga keuangan, lembaga pelatihan, dan UMKM sendiri perlu berkolaborasi Sangat penting untuk meningkatkan akses ke pendanaan, pelatihan, dan pendidikan, untuk mendorong kolaborasi dengan perusahaan besar, dan untuk meningkatkan kualitas dan standar produk. Dalam upaya mendorong perkembangan dan kelangsungan hidup UMKM, pemerintah Indonesia menugaskan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan program yang mendukung sektor tersebut. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan penting dalam

pemberdayaan UMKM melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan dan pendampingan, pemberian akses pembiayaan, pengembangan pasar, promosi produk, dan penyediaan infrastruktur pendukung.

Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan UMKM, terbukti dengan adanya peraturan UMKM Kota Batam, peraturan daerah yang memberdayakan UMKM di Kota Batam. Beberapa peraturan daerah telah diterapkan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Batam, antara lain Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan UMKM, berupaya meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing UMKM di Kota Batam dengan memberikan bantuan berupa pendampingan, pelatihan, akses pasar, dan permodalan usaha. Melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dan perbankan, peraturan ini memperluas ketersediaan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah dengan tarif dan persyaratan yang lebih wajar.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah. Peraturan ini memastikan bahwa UMKM memiliki akses yang sama terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Dengan adanya Perda yang memberdayakan UMKM diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Batam dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan di Kota Batam.

Banyak penelitian membicarakan hal yang sama membahas tentang pemberdayaan UMKM adalah. Penelitian Elfina Chairunisa (2020), berjudul Peran Pelayanan Koperasi dan UKM Provinsi NTB Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Sektor Menengah. Penelitian tersebut mengkaji tentang peran Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dalam konteks pengembangan strategis sektor UKM. Pertumbuhan yang efektif untuk mendorong peningkatan jumlah UKM di Provinsi NTB, strategi pengembangan yang efektif untuk mendorong pengembangan kapasitas dan manajemen UKM di Provinsi NTB, dan strategi fasilitasi pengembangan UKM. Proteksi cukup efektif dalam memenuhi aspek legalitas, sertifikasi, standarisasi, dan permodalan bagi UKM di Provinsi NTB, serta strategi pola kemitraan dan jaringan usaha untuk memperluas akses pasar bagi UKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penelitian kedua oleh Siska Febrianti (2020), berjudul Strategi Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Tulungagung Sepanjang wabah Covid-19. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada masa Pandemi Covid-19, meliputi pengadaan pelatihan, pengadaan bimtek, pemasaran online, dan pendirian galeri. Pasang KUMKM. Dalam strategi ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menggunakan pendekatan berbasis integrasi dengan tujuan untuk mempercepat arus distribusi baik bahan baku maupun alat produksi.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Christofer Ondang, Frans Singkoh, dan Neni Kumayas (2019), dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa menuju kemandiriannya. Penelitian ini mengkaji pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan teori Jim Ife dan Frank Tesoriero, yaitu peran fasilitatif, peran edukatif, peran representatif, dan peran teknis. Dalam penelitian ini Peneliti dapat mengetahui peran dan program dinas koperasi untuk pertumbuhan UMKM. Selain itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena memiliki temuan atau hasil yang baru dan berbeda, seperti mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan usaha mikro atau mengidentifikasi metode yang lebih efisien untuk mengembangkan usaha mikro.

Dengan melakukan penelitian tentang **PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA BATAM**, peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menjalankan fungsinya yaitu pemberdayaan UMKM. dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita mengenai peran Dinas koperasi dan usaha mikro di kota Batam.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks sebelumnya, **masalah** berikut telah diidentifikasi:

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Batam masih mengalami keterbatasan pembiayaan yang memadai untuk pengembangan usaha.
2. Masih terdapat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha, serta kendala dalam memasarkan produknya secara efektif.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti maka, peneliti memusatkan analisis tentang peran Dinas Koperasi dan Usaha mikro dalam pemberdayaan UMKM di Kota Batam, yang berfokus pada peran pemberdayaan, kebijakan, dan program, untuk meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, dan daya saing UMKM Kota Batam.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini, maka, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memberdayakan UMKM Kota Batam?

2. Kebijakan, program, dan layanan apa saja yang ditawarkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Batam untuk mendukung dan memajukan UMKM?

1.5. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan, program, dan layanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendukung dan memajukan UMKM.
2. Untuk mengetahui kebijakan program pemberdayaan yang efektif oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam untuk meningkatkan pengembangan UMKM dengan memberdayakan UMKM.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi masyarakat tentang perkembangan UMKM, dengan mempertimbangkan program-program pemerintah terkini untuk kesejahteraan masyarakat. Keuntungan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan UMKM. Ini akan berkontribusi pada pengembangan teori dan model analisis baru yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM dan untuk mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan UMKM.

- b. Diharapkan temuan studi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan program yang memberdayakan UMKM secara lebih efektif. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kebutuhan dan hambatan yang dihadapi oleh UMKM dan merancang program untuk meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya dan bantuan yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teoritis

2.1.1. Konsep Peran Pemerintahan

Menurut peran (Salam & Prathama, 2022) seseorang merupakan aspek dinamis dari status atau kedudukannya. Ketika seseorang memenuhi hak dan tanggung jawab berdasarkan posisinya, dia melakukan peran. Asal kata “peran” adalah “peran” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “pemain”. Dalam konteks ini, peran dapat dipahami sebagai peran yang dimainkan seseorang.

Peran adalah aspek dinamis yang didasarkan pada status ketika seseorang menjalankan hak dan tanggung jawab sesuai dengan statusnya. Ketika seseorang memenuhi tugas dan haknya, dia akan mengambil fungsi dan peran sesuai posisi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seseorang berperan ketika ia menjalankan hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan suatu jabatan tertentu. Tugas adalah tugas yang harus diselesaikan oleh seseorang dengan otoritas dan status tertentu dalam masyarakat. Setiap fungsi adalah tugas yang harus dilakukan oleh orang yang bertugas. Dalam pengertian ini, peran adalah tugas yang diharapkan dapat diselesaikan oleh anggota masyarakat pemegang otoritas.

Parameter peran menurut Soerjono Soekanto (Tumija, 2022) meliputi tiga aspek krusial:

1. Norma yang terkait dengan posisi atau lokasi seseorang dalam masyarakat termasuk dalam peran mereka. Dalam konteks ini, peran adalah seperangkat aturan yang mengatur eksistensi sosial seseorang.
2. Peran adalah suatu konsep yang menggambarkan perilaku yang dapat dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi sosial.
3. Peran juga dapat didefinisikan sebagai perilaku individu, yang penting untuk struktur sosial suatu masyarakat.

Hal senada dikemukakan oleh (Ondang et al., 2019) Fungsi peran dapat dilihat dari tiga sudut pandang:

1. Penjelasan sejarah menyebutkan konsep peran asli yang berasal dari drama Yunani atau Romawi kuno atau teater langsung. Dalam artian Dalam konteks ini, istilah 'peran' mengacu pada karakter yang ditugaskan kepada seorang aktor dalam sebuah lakon panggung.
2. Penjelasan yang mengacu pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai fungsi yang dilakukan oleh seorang individu yang menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial.
3. Penjelasan lebih operasional menjelaskan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dibuat oleh aktor lain yang sama-sama dalam satu penampilan/peran (role performance). Hubungan satu aktor dengan aktor lainnya saling bergantung dan saling melengkapi.

Menurut (Taufik et al., 2021), kedudukan atau status seseorang pada dasarnya bersifat dinamis. Status seseorang adalah kumpulan dari hak istimewa dan tanggung jawab mereka. Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu fungsi. Kita dapat menjelaskan pengaruh timbal balik antara individu yang melakukan suatu tindakan (aktor) dan struktur sosial dengan menggunakan teori penggunaan peran. Striker membangun teori peran dalam konteks ini menggunakan prinsip umum berikut: Tindakan manusia (aktor) bergantung pada alam semesta yang diberi nama dan diklasifikasikan. Aktor belajar bagaimana mengklasifikasikan dan bertindak melalui interaksi mereka dengan orang lain. Mereka juga menyelidiki simbol-simbol yang digunakan untuk menentukan posisi sosial. Perilaku bersama yang diasosiasikan dengan posisi sosial diasosiasikan dengan peran.

Aktor bertindak dalam konteks yang diciptakan oleh struktur sosial yang luas (sebagai pola perilaku yang terorganisir). Aktor mengidentifikasi dan mendefinisikan situasi, partisipan, dan diri mereka sendiri ketika berinteraksi. Aktor menggunakan penegasan situasional ini untuk mengatur perilaku mereka sendiri. Perilaku sosial dipengaruhi oleh makna sosial, tetapi tidak sepenuhnya ditentukan oleh makna sosial itu sendiri. Dalam konteks ini, teori penggunaan peran sangat penting untuk memahami hubungan rumit antara individu dan struktur sosial.

Penulis menyimpulkan, berdasarkan definisi-definisi sebelumnya, bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau

sekelompok orang terhadap seseorang dengan status dan kedudukan tertentu. menegakkan hukum dan mengayomi masyarakat, dengan tujuan akhir tercapainya ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam situasi ini, perannya adalah menjadi kreatif dan melakukan peran kreatif.

Pemerintah mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh otoritas suatu negara untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari posisi ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Pemerintah memainkan peran penting dalam melaksanakan tanggung jawab negara dan melindungi kepentingan umum. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan negara, seperti mengeluarkan kebijakan dan peraturan, mengawasi kegiatan ekonomi, dan menyediakan layanan masyarakat.

Pemerintah Daerah berperan penting dalam membina dan mengawasi daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal angka 5 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam rangka melindungi, melayani memberdayakan, dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Kota Batam, pemerintah harus membuat kebijakan dan peraturan yang ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengawasi kegiatan ekonomi dan bisnis, termasuk memastikan bahwa bisnis tidak melanggar peraturan dan mematuhi standar keselamatan. Pemerintah juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan warganya melalui pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab untuk membina lingkungan yang ramah investasi, meningkatkan kualitas infrastruktur dan sistem pendidikan, dan memberikan dukungan kepada sektor-sektor ekonomi utama. Peneliti mengadopsi definisi peran pemerintah dari (Tambunan, 2022), yang efektif dalam pengembangan usaha masyarakat, sebagai berikut:

1. Fungsi Regulasi/Pengaturan

Pengaturan kebijakan publik/negara adalah fungsi regulasi/regulasi yang tidak dapat didelegasikan, dialihkan, atau diprivatisasi kepada organisasi atau lembaga di luar pemerintahan. Salah satunya adalah Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kebijaksanaan itu dapat tertulis atau tidak tertulis, tetapi kebijaksanaan pemerintahan Negara harus dirumuskan secara tertulis dengan mengikuti “sistem dan proses penyusunan hukum nasional” dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian hukum serta hubungan yang jelas dan kompatibilitas satu sama lain.

- a. Adanya kebijakan yang mengutamakan pertumbuhan dan perkembangan UMKM.
- b. Pemberian insentif pajak atau bantuan keuangan kepada UMKM.

- c. Menerapkan kebijakan yang mendorong kerjasama antara UMKM dengan perusahaan besar atau instansi pemerintah.

2. Pengabdian Kepada Masyarakat

Ada tiga fungsi pemerintahan yang mendasar: pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Fungsi pelayanan adalah peran pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik yang tidak dapat diprivatisasi, seperti pelayanan pertahanan dan keamanan, pelayanan sipil, dan pelayanan birokrasi. Dalam hal pengabdian masyarakat di lingkup UMKM, pemerintah menyediakan berbagai sumber daya pendukung, seperti:

- a. Tersedianya jaringan transportasi dan logistik yang mudah diakses.
- b. Akses ke sumber energi yang terjangkau dan dapat diandalkan.
- c. Tersedianya fasilitas TIK yang mendukung UMKM.

3. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Fungsi pemberdayaan masyarakat berkorelasi negatif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial anggota masyarakat, dalam arti semakin tinggi taraf hidup anggota masyarakat maka semakin kuat posisi tawarnya, dan semakin menyatukan masyarakat. Berkelanjutan, mencakup semua, dan merangsang sampai mencapai keseimbangan dinamis antara pemerintah dan warga negara, pemberdayaan dicirikan oleh karakteristik ini. Keberadaan lembaga dan lembaga pendukung UMKM, seperti Dinas Koperasi dan UKM, koperasi, asosiasi UMKM,

dan balai pelatihan, dapat mempengaruhi peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM:

- a. Pengusaha UMKM memiliki akses ke program pelatihan dan pengembangan bakat.
- b. Tersedianya mekanisme konsultasi dan advokasi bagi UMKM.
- c. Pemerintah dan lembaga pendukung UMKM bekerja sama dengan erat.

Selain dukungan sumber daya dan lingkungan, diperlukan kelembagaan yang kuat yang didukung oleh pejabat yang perilakunya sejalan dengan nilai dan norma masyarakat dan pemerintah yang berlaku untuk mengembangkan tugas berat ini. Tindakan ini harus diambil oleh pemerintah mengingat perubahan masyarakat ke depan akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap segala kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Untuk memenuhi fungsinya sebagai katalis, pemerintah berperan sebagai stimulan untuk mempercepat perkembangan UMKM. Pemerintah tidak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan ini secara keseluruhan, tetapi hanya sebagai katalis. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti pelatihan, sosialisasi, dan pemberdayaan pelaku UMKM Kota Batam untuk membantu proses pemasaran di era digital, selain membangun infrastruktur intelektual lainnya.

2.1.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah

Menurut (Khairina et al., 2020), peran pemerintah ditentukan oleh interaksi antara kelompok-kelompok masyarakat dan sistem politik, serta bagaimana

pemerintah merespons berbagai tekanan dan tuntutan dari masyarakat. Menurut David Eston Beberapa faktor berikut mempengaruhi peran pemerintah adalah:

1. Kondisi ekonomi

suatu negara dapat berdampak pada fungsi pemerintah. Jika ekonomi suatu negara kuat dan stabil, pemerintah mungkin dapat membiayai program sosial dan ekonomi, memberikan bantuan kepada sektor yang membutuhkan, dan mendorong pembangunan ekonomi. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang lemah mungkin mengharuskan pemerintah untuk fokus pada pemulihan ekonomi, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan kebijakan fiskal, dapat dilihat dari segi:

- a. pertumbuhan ekonomi,
- b. tingkat pengangguran,

2. Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik oleh pemerintah juga berdampak pada peran pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mencakup peraturan, subsidi, insentif, atau program lain yang ditujukan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, atau mendorong pertumbuhan industri tertentu. Kebijakan publik yang efektif dan efisien dapat meningkatkan peran pemerintah dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Faktor penting dalam menentukan arah dan prioritas tindakan pemerintah adalah kebijakan publik. Kebijakan ini biasanya dipengaruhi oleh:

- a. tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (seperti konsultasi publik);
- b. transparansi dalam pembuatan kebijakan; dan
- c. kepekaan terhadap aspirasi masyarakat.

2.2. Pemberdayaan UKM

Pemberdayaan adalah langkah peningkatan dan pengembangan sektor tertentu melalui berbagai strategi, program, dan kebijakan, sebagai akibat atau tanggung jawab kepada pelaku yang memerlukannya. (Lodan et al., 2023), menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang berkembang menunjukkan perlunya percepatan pembangunan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, melalui penyediaan sarana/prasarana, pengembangan kelembagaan pengelolaan sumberdaya, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumberdaya alam unggulan.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan dan memperkuat fondasi ekonomi sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan. Berbagai kebijakan, inisiatif, dan kegiatan telah dilaksanakan untuk memberdayakan UMKM. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diterbitkan pemerintah menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM. Angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa Pemberdayaan adalah

upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang kuat dan mandiri.

Pemberdayaan juga dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi melalui pemanfaatan modal intelektual, sehingga semua masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. (Purnomo et al., 2020). Iklim usaha adalah suatu kondisi dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupaya untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui pemberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, sehingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Usaha memperoleh nikmat, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan usaha sebanyak-banyaknya.

Pembangunan adalah upaya Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian kemudahan, pembinaan, pendampingan, dan penguatan bantuan agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat tumbuh dan meningkatkan kemampuan dan daya saing mereka. Intermedial. Sebagai instansi terkait langsung, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya mengkoordinasikan kebijakan pembangunan yang mendorong tumbuh kembang koperasi dan UMKM yang berdaya saing tinggi.

Program kerja yang disusun bertujuan untuk memberikan peluang usaha yang sama bagi koperasi dan UKM dengan pelaku usaha lainnya, meningkatkan mobilitas sumber daya UMKM, menekan biaya transaksi bagi UMKM,

menghilangkan biaya ekonomi tinggi bagi UMKM, serta mencabut berbagai regulasi dan kebijakan. yang menghambat pemberdayaan UMKM di Indonesia. Indonesia. Menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2008, prinsip pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah didasarkan pada:

- Keluarga, Demokrasi ekonomi, Kebersamaan,
- Efisiensi berkeadilan, Berkelanjutan,
- Berwawasan lingkungan, kemandirian,
- Keseimbangan kemajuan; dan kesatuan ekonomi nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab II (pasal 4 dan 5), Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip pemberdayaan usaha kecil dan menengah

- a. Meningkatkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM agar dapat bekerja secara mandiri.
- b. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.

- d. Pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang terintegrasi.

2. Tujuan Pemberdayaan UMKM

- a. Mewujudkan struktur ekonomi nasional yang seimbang, berkembang, dan merata.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kapasitas UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam membina dan mengatur masyarakat setempat. Berdasarkan Bab I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Umum Pemerintahan Daerah Menurut Pasal 5 urusan pemerintahan merupakan kewenangan daerah kekuasaan pemerintahan. Presiden yang kebijakannya dilaksanakan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan memajukan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah memiliki peran penting dalam

pemberdayaan UMKM yang mencakup permodalan, pelatihan, pemberdayaan, promosi, dan pengawasan. Pelatihan:

Dinas Koperasi dan UKM menyelenggarakan program penyuluhan dan pelatihan bagi para pengusaha UMKM guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Pelatihan ini meliputi manajemen usaha, pemasaran, keuangan, produksi, dan pengembangan produk. Dengan demikian, UMKM dapat memaksimalkan potensinya dan meningkatkan daya saingnya dengan:

- a. Jumlah kunjungan lapangan dan pendampingan pengembangan usaha yang dilakukan bagi pelaku UMKM.
- b. Tingkat keberhasilan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan kualitas usahanya setelah mendapat pendampingan dari Dinas Koperasi dan UKM.

2. Pendampingan dan Konsultasi:

Dinas Koperasi dan UKM memberikan pendampingan dan konsultasi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menghadapi tantangan dan mengembangkan usahanya. Tim lembaga ini dapat memberikan bantuan dalam perencanaan bisnis, pemilihan strategi pemasaran, administrasi keuangan, perizinan, dan masalah hukum lainnya. Bantuan ini membantu usaha mikro, kecil, dan menengah dalam membuat keputusan yang tepat dan meningkatkan manajemen bisnis mereka.

- a. Kuantitas informasi yang diberikan kepada pelaku UMKM terkait UMKM.
- b. Banyaknya konsultasi dengan pelaku UMKM untuk memberikan arahan dan solusi atas permasalahan usahanya.

3. Penyediaan Bantuan Pembiayaan dan Permodalan:

Dinas Koperasi dan UKM dapat memberikan pembiayaan atau program bantuan permodalan untuk membantu UKM mendapatkan akses terhadap sumber keuangan yang dibutuhkan. Program ini dapat terdiri dari pinjaman berbunga rendah, inisiatif kredit bisnis untuk individu, atau bantuan modal langsung. Pembiayaan atau bantuan permodalan membantu UMKM dalam pengembangan usaha, investasi, dan peningkatan kapasitas produksi.

- a. Jumlah program pembiayaan yang didukung pemerintah untuk usaha kecil dan menengah.
- b. Sejauh mana UMKM dapat mengakses pembiayaan melalui program yang disponsori pemerintah.

4. Penguatan Jaringan Usaha dan Kemitraan:

Dinas Koperasi dan UKM mendorong UMKM untuk berpartisipasi dalam jaringan usaha dan kemitraan dengan perusahaan besar, lembaga keuangan, dan asosiasi industri. Melalui kegiatan ini, UMKM dapat memperluas jaringan,

menjalin kemitraan, dan memperoleh peluang pemasaran, distribusi, dan akses pasar baru.

- a. Banyaknya kerjasama antara UMKM dengan perusahaan besar atau instansi pemerintah sebagai hasil inisiatif Dinas Koperasi dan UKM.
- b. Sejauh mana UMKM berpartisipasi dalam kegiatan jaringan atau asosiasi yang didukung oleh Dinas Koperasi dan UKM.

5. Promosi dan Pemasaran

Dinas Koperasi dan UKM memiliki fungsi dalam mempromosikan dan memasarkan produk UMKM. Mereka dapat menyelenggarakan pameran, bazaar, dan acara lainnya untuk menghubungkan UMKM dengan konsumen dan calon pembeli. Selain itu, agensi ini dapat membantu UMKM dengan strategi branding, pengemasan, dan pemasaran untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk mereka.

- a. Jumlah program promosi dan pameran yang didukung pemerintah untuk memperkenalkan produk UMKM ke pasar.
- b. Sejauh mana peningkatan akses pasar dan penjualan produk UMKM setelah mendapat bantuan pemasaran dari pemerintah.
- c. Tersedianya platform digital atau marketplace yang didukung pemerintah untuk memperluas jangkauan pemasaran UMKM.

Dengan melaksanakan berbagai kegiatan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup UMKM dalam jangka panjang.

2.2.1. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting, khususnya di Indonesia. Banyaknya jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah akan meningkatkan kesempatan kerja bagi para penganggur. UMKM merupakan kategori usaha terbesar dan telah menunjukkan ketahanan terhadap berbagai jenis guncangan krisis ekonomi. 21 Kriteria perusahaan untuk diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah dikodifikasi dengan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meliputi:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat sahnya Usaha Mikro
- b. Pengertian usaha kecil adalah usaha ekonomi mandiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. yang memenuhi kriteria usaha kecil. kecil dalam arti UU

- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau tahunan. hasil penjualan yang ditentukan oleh undang-undang.

2.2.2. Karakteristik UMKM

Untuk melaksanakan pemberdayaan secara menyeluruh perlu memahami ciri-cirinya, sehingga dapat dilakukan diagnosis untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Berikut adalah ciri-ciri UKM:

1. Skala kecil, model pemanfaatan tenaga kerja, dan orientasi pasar.
2. Banyak yang berlokasi di daerah pedesaan, desa kecil, dan pinggiran kota besar. Pekerjaan sering dilakukan secara paruh waktu atau sebagai sampingan dari kegiatan.
3. Tidak ada pemisahan yang jelas antara tanggung jawab administratif dan operasional. Sebagian besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikelola oleh individu yang juga merupakan pemilik dan pengurus perusahaan, serta mempekerjakan keluarga dan teman dekat.
4. Industri kecil memiliki akses terbatas ke lembaga kredit formal; akibatnya, mereka mengandalkan modal sendiri atau sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir, untuk membiayai usahanya.

5. Mayoritas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak memiliki status badan hukum.
6. Berdasarkan kelompok industri, terlihat bahwa hampir sepertiga dari seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terlibat dalam kelompok usaha industri makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh industri barang mineral bukan logam kelompok, industri tekstil, dan kayu, bambu, rotan, rumput, dan sejenisnya, termasuk perabot rumah tangga, masing-masing berkisar antara 21 sampai 22 persen dari seluruh industri kecil yang ada. Kurang dari satu persen penduduk bergerak di kelompok usaha industri kertas dan kimia.

2.2.3. Kriteria UMKM

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dibedakan dari usaha skala besar berdasarkan kriteria dan karakteristiknya masing-masing. Dari segi permodalan dan sumber daya manusia, UMKM dibedakan dengan korporasi besar. Perusahaan kecil dan menengah membutuhkan modal yang relatif lebih sedikit daripada perusahaan besar. Sesuai UU No. 20 Tahun 2008, klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didasarkan pada jumlah aset dan omzet suatu usaha.

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu, individu, atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan fasilitas tempat usaha tersebut dijalankan.
 - b. Memiliki penjualan tahunan Rp 3000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dalam penjualan tahunan.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh individu atau perusahaan yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh bank, dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dan sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha beroperasi.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau lebih. Dan sampai dengan dua milyar lima ratus juta rupiah (Rp 2 milyar lima ratus juta).
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan juga dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dari badan usaha tersebut maupun dimiliki atau dikendalikan oleh bank, dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan finansial lebih dari Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah). Selain itu, limit sebesar Rp 10 miliar (sepuluh miliar

rupiah). Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat perusahaan produksi berada.

- b. Memiliki pendapatan tahunan antara Rp 2500 000 000 dan Rp 50.000.000 000.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk menemukan perbandingan dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya (Wardaniah et al., 2022). Selain itu, penelitian sebelumnya berfungsi untuk memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitasnya. Hal ini perlu ditekankan dengan meringkas setiap penyelidikan agar tidak terjadi duplikasi dalam penelitian ini. lebih awal.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

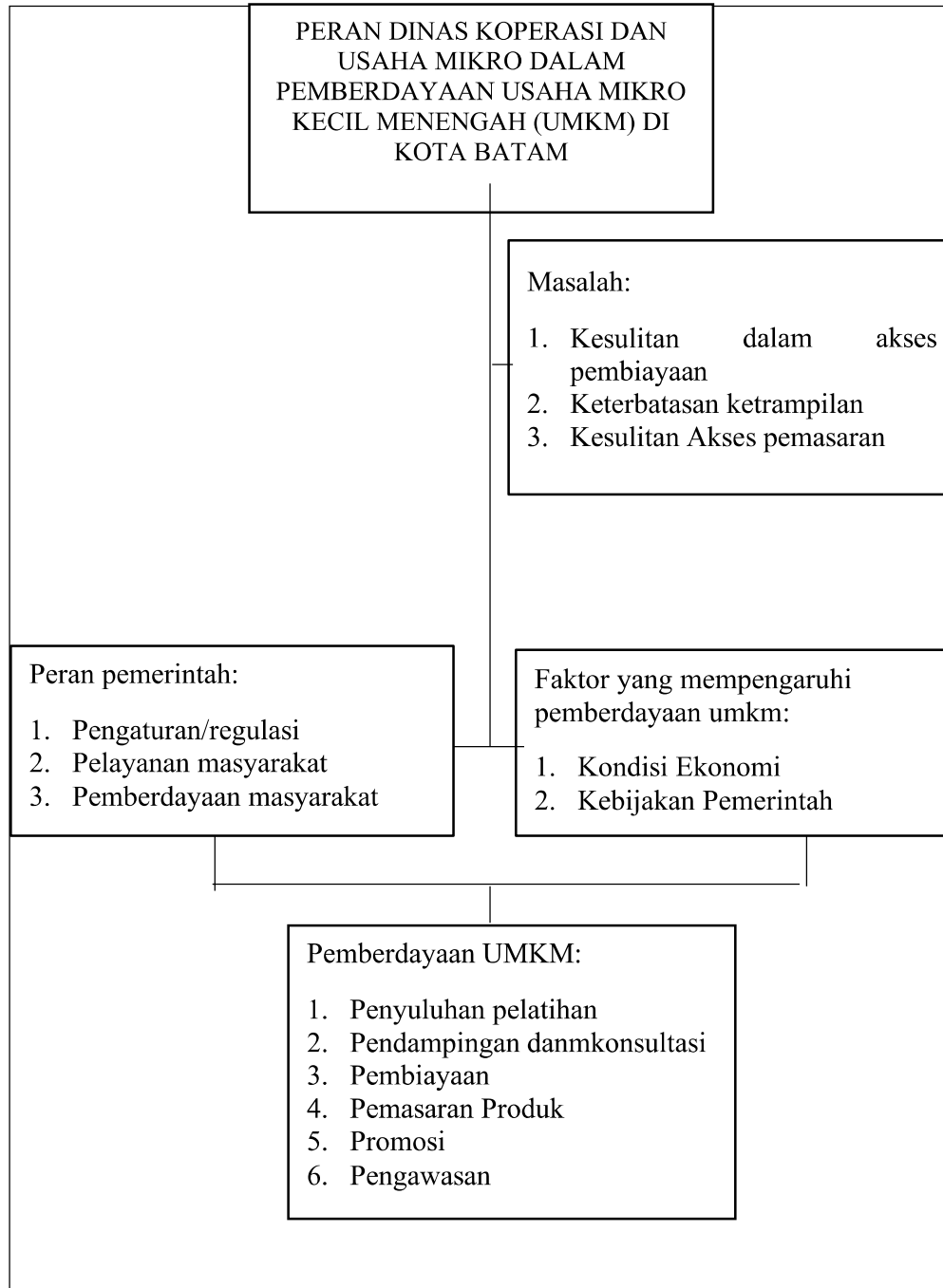
NO	Penulis/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Hesti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi (2020)	Peranan Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang	kualitatif	pemberdayaan yang dilakukan belum maksimal dan merata karena data jumlah UKM belum valid dengan faktor pendukung dan penghambatnya. Saran yang diberikan adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melakukan

NO	Penulis/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				pendataan terhadap semua UKM yang ada di Malang.
2	Dwi SeprionoNur (2020)	Peran Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Samarinda	Kualitatif	Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM termasuk upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pemasaran produk UKM di Kota Samarinda.
3	Daniar Pramesti Ningrum (2021)	Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Surabaya	Kualitatif	pemberdayaan UMKM sudah merata namun dalam menangani pertumbuhan iklim usaha belum terlaksana dengan baik
4	Anisa,Mahvira (2021)	Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Binjai	Kualitatif	Dikatakan bahwa upaya Dinas Koperasi dan UKM untuk mendorong UMKM selama pandemi COVID-19 di Kota Binjai telah berjalan dengan baik, meskipun masih belum sepenuhnya seperti sebelum pandemi.

NO	Penulis/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
5	Siti Nurhalita, Imsar (2022)	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten Langkat	Kualitatif	Besarnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dinas koperasi Kabupaten Langkat terhadap kemandirian UMKM di Langkat
6	Dahliah (2022)	Peran Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kualitatif	Terciptanya iklim yang kondusif, Meningkatkan Pembiayaan dan permodalan bagi UMKM, Sasaran Peningkatan kerjasama bagi semua pelaku usaha, baik swasta maupun pemerintah
7	Mohammad, Salam Prayoga 2022	Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Di	Kualitatif	masih adanya hambatan berupa terbatasnya bantuan permodalan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

NO	Penulis/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Peneitian
		Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah		Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tolitoli.

2.4. Kerangka Berpikir





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dimaksudkan, penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Sugiyono (2019) berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filosofi positivisme atau interpretif, digunakan untuk mengkaji kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi kombinasi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan sebagian besar bersifat kualitatif, dan analisisnya bersifat induktif/kualitatif untuk menghasilkan informasi yang komprehensif tentang kondisi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan analisis data secara menyeluruh untuk mendapatkan hasil yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini berupaya memahami dan mengkaji peran dinas koperasi dan usaha mikro kecil dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Batam.

3.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan berfokus untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan UMKM di Kota Batam. Dalam penelitian ini bersifat berkelanjutan dari penelitian sebelumnya tentang Peran dinas koperasi dan Usaha

Mikro dalam pemberdayaan UMKM di Kota Batam, Data yang terkumpul melalui wawancara, analisis dokumentasi, dan observasi akan dianalisis secara deskriptif dan interpretatif. Temuan data yang dikumpulkan didasarkan pada data sekunder dari buku-buku yang relevan, artikel, dan studi sebelumnya, selain data primer dari studi lapangan dan wawancara.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pemeriksaan ini dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang beralamat di Jl. Pramuka no.1 – Sungai Harapan, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444 yang masih bergerak dalam pemberdayaan UMKM. Lokasi ini dipilih berdasarkan ketersediaan dan keterjangkauan data yang cukup untuk melakukan penelitian.

Tabel 3.1 Tabel Periode Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN																	
		MARET 2023			APRIL 2023			MEI 2023		JUNI 2023		JULY 2023							
1	Studi Pustaka	■	■	■	■														
2	Penyusunan Proposal	■	■	■	■														
3	Pengumpulan Data					■	■	■	■										
4	Pengolahan Data					■	■	■	■										
5	Analisis Hasil Penelitian									■	■	■	■						
6	Penyusunan Laporan									■	■	■	■						
7	Penyerahan Laporan													■	■	■	■	■	■
8	Sidang Hasil													■	■	■	■	■	■

3.4.Sumber Data

Berikut adalah sumber data yang digunakan oleh penulis:

1. Data Primer

Melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang bergerak dalam pemberdayaan UMKM, seperti pejabat dinas koperasi, pengusaha UMKM, dan pemilik UMKM, dikumpulkan data primer. Untuk mengetahui persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka tentang peran dinas koperasi dan UKM dalam pemberdayaan UMKM, akan dilakukan wawancara mendalam. Rekaman wawancara akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul.

2.Data Sekunder

Fungsi layanan koperasi dan UKM dalam memberdayakan UMKM akan dikaji dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari dokumen dan literatur terkait. Dokumen-dokumen ini dapat mencakup kebijakan pemerintah, laporan kegiatan layanan koperasi, penelitian sebelumnya, dan sumber informasi terkait lainnya. Data sekunder akan diteliti untuk mendukung dan melengkapi data primer yang terkumpul.

3.5.Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Akan ditentukan melalui wawancara mendalam peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memberdayakan UMKM. Wawancara akan dilakukan agar penulis dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang program pemberdayaan UMKM di Batam.

2. Pengamatan

Pengamatan langsung dilakukan untuk mengamati kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, seperti pelatihan, seminar, pameran, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM. Pengamatan akan memberikan wawasan langsung tentang interaksi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan UMKM, serta dampak dari kegiatan yang dilakukan.

3.6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti didasarkan pada:

1. Data Collection (pengumpulan data) Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi, dan segala dokumentasi.
2. Reduksi Data (data reduction) Menurut (Rijali, 2019), reduksi data adalah usaha meringkas data, yang dilanjutkan dengan pengelompokan data ke dalam unit-unit konseptual, kategori, dan tema tertentu. Untuk memudahkan penjelasan dan penegasan kesimpulan, peneliti mengorganisasikan data yang dikumpulkan, termasuk data dari informan, buku, dan penelitian sebelumnya, sehingga lebih ringkas dan lugas.

3. Data Display (Penyajian Data) Setelah dilakukan reduksi data, peneliti menyajikan data guna memberikan gambaran atau penjelasan.
4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (penarikan kesimpulan/verifikasi) Pada tahap penyimpulan penelitian, peneliti menarik kesimpulan dari temuan-temuan penelitian yang dilakukan.

3.7. Definisi Istilah Operasional dan Variabel Penelitian

Menurut (Tumija, 2022), pengertian operasional variabel penelitian adalah batasan dan cara mengukur variabel yang akan diteliti. Untuk mencegah terjadinya interpretasi yang beragam terhadap konsep yang digunakan dalam penelitian ini, konsep-konsep berikut diusulkan:

Tabel 3.2 Defenisi Operasional

N0	Teori	Defeisi	Indikator Referensi	Sub Indikator
1	Peran Pemerintah	Pemerintah adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang dalam suatu negara untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat Mudrajat Kuncoro (2019).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi, 2. Pelayanan Kepada Masyarakat, 3. Pemberdayaa n Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penetapan kebijakan, 2. Menerapkan kebijakan yang 3. mendorong kerjasama 1. Tersedianya jaringan transportasi 2. Akses ke sumber energi 3. Tersedianya fasilitas TIK 1. Akseske program

				<ul style="list-style-type: none"> 2. Tersedianya mekanisme konsultasi 3. Pemerintah dan lembaga pendukung
2	Faktor yang mempengaruhi peran pemerintah	peran pemerintah ditentukan oleh interaksi antara kelompok-kelompok masyarakat dan sistem politik, serta bagaimana pemerintah merespons berbagai tekanan dan tuntutan dari masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kondisi ekonomi, 2. Kebijakan Publik, 	<ul style="list-style-type: none"> 1. pertumbuhan ekonomi, 2. tingkat pengangguran, 1. tingkat partisipasi masyarakat 2. transparansi dalam pembuatan kebijakan
3	Pemberdayaan Umkm	Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor tertentu melalui penggunaan berbagai strategi, program, dan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh wewenang atau tanggung jawab aktor yang membutukanny	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan dan Pelatihan, 2. Pendampingan dan Konsultasi, 3. Pemberian Pembiayaan dan Bantuan Modal, 4. Penguatan Jaringan dan Kemitraan, 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kunjungan 2. Tingkat keberhasilan usaha mikro 1. Kuantitas informasi 2. Banyaknya konsultasi dengan pelaku UMKM 1. Jumlah program pembiayaan 2. Mengakses pembiayaan 1. kerjasama antara UMKM

		a. Soemarno (2019)	5. Promosi dan Pemasaran,	dengan perusahaan 2. UMKM berpartisipasi 1. peningkatan akses pasar 2. Tersedianya platform digital
--	--	--------------------	---------------------------	--